

**PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN  
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK  
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR  
PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA  
EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2016)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi



Oleh

**Nama** : SEPTIA MUSTIKA SARI  
**NPM** : 1405170683  
**Program Studi** : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : SEPTIA MUSTIKA SARI  
NPM : 1405170683  
Prodi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2016)

Dinyatakan *BIA Lulus dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

Penguji II

HENDRA HARMAIN, SE, M.Si

Pembimbing

HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak

Panitia Ujian

Ketua



H. JANURI, SE, MM, M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE, M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

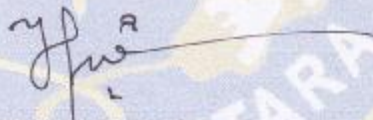
Skripsi ini disusun oleh:

Nama : SEPTIA MUSTIKA SARI  
N P M : 1405170683  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2016)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

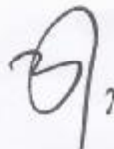
Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

  
(HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak)

Diketahui/Disetujui  
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU




(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan



Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

Surat Pernyataan Yang Mengungkapkan Cara Dengan Melakukan Laporan  
Berkeseluruhan

## SURAT KETERANGAN ORISINIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Septia Mustika Sari

NPM : 1405170683

Program Studi : Akuntansi Ekonomi

Judul Skripsi : Pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak (studi empiris pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016)

Dengan ini menyatakan

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila poin 1 dan 2 diatas saya langgar, maka bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri

Demikian surat pernyataan ini perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Medan, Maret 2018  
Hormat Saya  
Yang membuat Pernyataan



*Septia Mustika Sari*

Septia Mustika Sari





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : SEPTIA MUSTIKA SARI  
N.P.M : 1405170683  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2016)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
07/02	Aca ditamptkn ke Sidney Meja bimbingan. Dica 07/02 .2018 Herry Wahyudi		

Pembimbing Skripsi

HERRY WAHYUDI, SE, M. AK

Medan, Februari 2018  
Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

## ABSTRAK

**Septia Mustika Sari. NPM 1405170683. Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2018.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* dan ukuran perusahaan secara parsial dan simultan terhadap agresivitas pajak. Pengungkapan CSR dan ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel independen. Agresivitas pajak menggunakan proksi *Effective tax rate* (ETR) sebagai variabel dependen.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Sampel berjumlah 40 terdiri atas 8 perusahaan dikalikan dengan 5 tahun penelitian. Metode pemilihan sampel adalah *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.

Uji analisis regresi linier berganda yang dilakukan pada hipotesis pertama diperoleh nilai t sebesar 2,575 dan signifikansi 0,014 menunjukkan bahwa secara parsial pengungkapan CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak; pada uji hipotesis kedua diperoleh nilai t sebesar 8,145 dan signifikansi 0 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak; dan pada uji F untuk hipotesis ketiga diperoleh nilai F sebesar 34,472 dan signifikansi 0 yang berarti pengungkapan CSR dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

*Kata Kunci : pengungkapan CSR, Ukuran Perusahaan, ETR*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh*

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016)”**.

Shalawat berangkaikan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., karena telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan sekarang ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti-hentinya dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka :

1. Ayahanda tercinta Bapak Sukamto dan Ibunda tersayang Neneng Lestari yang telah memberikan dukungan baik secara materi maupun nonmateri serta nasehat kepada kakak.

2. Adik penulis yaitu Apriadi, Hendra Wijaya, Najua Winda Murti, dan Meita Khasanah yang selalu memberikan warna dalam kehidupan dengan heboh dan ricuhnya.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan ,SE,M.Si selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku wakil dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Herry Wahyudi, SE, M.Ak selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Bapak Dr. Muhyarsyah, SE, M.Si yang telah memberikan banyak nasihat dan motivasi selama penyusunan skripsi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Seluruh Staff Dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.



12. Kepada teman-teman seperjuangan Rara Dhea Febrina, Yuri Retno Sari, Rina Kurniawati, Khairani, Heni Agustina, Rahmawati, Yustia, Mitha Komala Sari dan juga teman-teman G-Pagi Akuntansi dan teman-teman stambuk 2014.
13. Kepada teman-teman satu rusunawa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Aisyah Sari Dewi Munthe, Hijah Monika Sari, Yani Andriesti Fily, Yuspita Yuanda Pohan, Fitri Mulyani, Nuraini dan seluruh penghuni rusunawa.

Penulis mohon kritik dan saran yang mendukung dari berbagai pihak. Atas segala bantuan dan dukungan serta bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai pihak, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga proposal ini bermanfaat dan kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Medan ,        Februari 2018  
Penulis

**Septia Mustika Sari**  
**1405170683**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Batasan dan Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
A. Uraian Teori.....	12
1. Agresivitas Pajak.....	12
2. Corporate Social Responsibility.....	32
3. Ukuran perusahaan .....	41
4. Penelitian Terdahulu.....	44
B. Kerangka Konseptual .....	46
C. Perumusan Hipotesis .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	49
B. Definisi Operasional.....	49
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	51
D. Populasi dan Sampel .....	51
E. Jenis dan Sumber Data .....	53
F. Teknik Pengumpulan Data .....	53
G. Teknik Analisis Data.....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
A. Gambaran umum objek penelitian.....	59
B. Pengujian dan Hasil Analisis data .....	61
1. Hasil Statistik Deskriptif .....	62

2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .....	62
a. Hasil uji asumsi klasik .....	62
1) Hasil Uji Normalitas .....	62
2) Hasil uji Multikolinearitas .....	64
3) Hasil uji Autokorelasi .....	65
4) Hasil uji Heterokedastisitas .....	66
b. Persamaan regresi.....	67
c. Hasil Uji Hipotesis .....	68
1) Hasil Uji t .....	68
2) Hasil Uji F .....	69
3) Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	69
C. Pembahasan .....	70
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

TABEL I.1 Nilai ETR Perusahaan yang menjadi sampel.....	5
TABEL I.3 Ukuran Perusahaan yang menjadi sampel.....	7
TABEL II.1 Penelitian Terdahulu .....	29
TABEL III.1 Daftar perusahaan yang menjadi sampel .....	38
TABEL IV.I Hasil Penentuan Sampel.....	44
TABEL IV.2 Daftar Perusahaan yang menjadi sampel.....	44
TABEL IV.3 Nilai <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	47
TABEL IV.4 Nilai ukuran perusahaan .....	48
TABEL IV.5 Nilai ETR perusahaan.....	49
TABEL IV.6 <i>Descriptive Statistic</i> .....	50
TABEL IV.7 Uji Normalitas <i>Kolmogrov-Smirnov</i> .....	54
TABEL IV.8 Uji Multikolinearitas .....	55
TABEL IV.9 Uji Autokorelasi .....	55
TABEL IV.10 Uji Heterokedatistitas .....	56
TABEL IV.11 Uji T.....	57
TABEL IV.12 Uji F (Uji Simultan).....	59
TABEL IV.13 Uji Koefisien Determinasi .....	59
TABEL IV.14 Hasil Pengujian Hipotesis.....	60



## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II.1 Kerangka Konseptual .....	33
GAMBAR IV.1 Diagram Normalitas dengan Diagram P-Plot.....	52
GAMBAR IV.2 Diagram Normalitas dengan histogram .....	53

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendapatan negara memegang peranan penting bagi kesejahteraan rakyat. Pendapatan negara merupakan penerimaan yang diperoleh untuk membiayai dan menjalankan seluruh program pemerintah demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah sangat berpengaruh dalam mengatur, menstabilkan, dan mengembangkan kegiatan ekonomi negara. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk melaksanakan pembangunan negara. Sumber-sumber penerimaan negara antara lain adalah pajak, retribusi, pinjaman, keuntungan BUMN/BUMD, dan lain-lain. Penerimaan negara yang paling potensial bersumber dari penerimaan pajak.

Pendekatan dari segi ekonomi, dimana pajak adalah sebagai bagian dari ilmu keuangan Negara, khususnya menyangkut pendapatan/penerimaan Negara, baik yang menyangkut penerimaan pemerintah pusat maupun penerimaan pemerintah daerah dalam bentuk pungutan terhadap masyarakat.

Pajak merupakan salah satu alat yang penting bagi pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi, politik dan sosial yang mengandung berbagai sasaran sebagai berikut :

1. Pengalihan sumber dana dari sektor swasta ke sektor pemerintah.
2. Pendistribusian beban pemerintah secara adil kedalam kelas-kelas penghasilan (*vertical equity*) dan secara merata bagi masyarakat yang berpenghasilan sama (*horizontal equity*)

3. Mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilisasi harga dan perluasan kesempatan kerja.

Pajak dan ketentuan pungutannya diatur dalam undang-undang seperti yang dinyatakan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III. Pasal 23A UUD 1945 berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa:

Subjek pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap lainnya.

Bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan yang penting. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Menurut Smith & Skousen (dalam Suandy, 2011), bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap

sebagai biaya/beban (*expense*) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah.

Beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan menyebabkan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, dimana perusahaan berusaha meminimalisasi beban pajak baik secara legal maupun ilegal.

Kegiatan usaha perbankan memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi modern terutama dalam kegiatan pembiayaan industri dan perdagangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari publik dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Industri perbankan memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan dengan sektor industri lain. Industri perbankan berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana. Selain itu perbankan juga berperan sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Menurut Frank et al (2009) dalam Suyanto dan Supramono (2012:167), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan baik dengan cara yang legal (*tax avoidance*) maupun dengan cara ilegal (*tax evasion*). Sedangkan menurut Yoehana (2013:5) agresivitas pajak merupakan keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui aktivitas tax planning dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

*Effective Tax Rates* (ETR) merupakan salah satu proksi yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak perusahaan. ETR pada dasarnya adalah sebuah



besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan (Ardyansah dan Zulaikha, 2014 dalam Muzakki, 2015: 22).

Dalam era kerusakan lingkungan dan mencuatnya egoisme manusia terhadap kondisi masyarakat sekeliling dibutuhkan perangkat sistem dan hukum untuk menanggulangi masalah ini.

Berangkat dari ruang tersebut maka tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan memiliki berbagai tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimasi dampak negatif dan maksimasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

Definisi CSR dalam *the European commission* adalah “ *a concept where by companies integrate social and environmental concern in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis*”. Nampak dalam penjabaran ini bahwa CSR merupakan konsep dimana perusahaan melakukan integrasi kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam integrasi mereka dengan pihak yang berkepentingan.

Watson (2012) dalam Purwanggono (2015: 6) menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat *corporate social responsibility* yang rendah merupakan perusahaan yang tidak bertanggungjawab secara sosial sehingga akan melakukan

tindakan perencanaan pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial atau memiliki tingkat *corporate social responsibility* yang lebih tinggi.

Hasil penelitian Lanis and Richardson (2013) ini sejalan dengan pandangan bahwa perusahaan merupakan *real entity* yang dikemukakan oleh Avi-Yonah (2008). Dalam pandangan *real entity*, perusahaan sama seperti individu yang terpisah dengan negara atau pemegang sahamnya. Implikasi untuk CSR adalah bahwa pandangan tentang CSR yang tidak ada kaitannya dengan perusahaan, tetapi bermanfaat bagi rakyat banyak, mestinya sama seperti pandangan terhadap individu. CSR secara hukum tidak diharuskan, tetapi akan sangat dihargai jika perusahaan melakukannya. Dari sisi pajak, perusahaan seharusnya tidak melakukan *strategic tax behaviour* atau penghindaran pajak. Dengan demikian, dalam pandangan *real entity*, perusahaan yang melakukan CSR seharusnya tidak melakukan penghindaran pajak.

Tabel I.1  
Nilai ETR perusahaan yang  
menjadi sampel penelitian

NO	NAMA PERUSAHAAN	2012	2013	2014	2015	2016	RATA-RATA
1	<b>BBNI</b>	0,2080	0,1969	0,1993	0,1950	0,2022	<b>0,2003</b>
2	<b>BBRI</b>	0,2168	0,2349	0,2135	0,2180	0,2280	<b>0,2222</b>
3	<b>BBTN</b>	0,2679	0,2703	0,2746	0,2718	0,2136	<b>0,2597</b>
4	<b>BDMN</b>	0,2496	0,2479	0,2451	0,2476	0,3643	<b>0,2709</b>
5	<b>BJTM</b>	0,2763	0,2854	0,3174	0,2987	0,2919	<b>0,2940</b>
6	<b>BMRI</b>	0,2175	0,2174	0,2058	0,1978	0,2112	<b>0,2100</b>
7	<b>BNGA</b>	0,2656	0,2634	0,2676	0,2493	0,2698	<b>0,2631</b>
8	<b>BNII</b>	0,2858	0,2811	0,2578	0,2598	0,2591	<b>0,2687</b>
	<b>RATA-RATA</b>	<b>0,2485</b>	<b>0,2496</b>	<b>0,2476</b>	<b>0,2423</b>	<b>0,2550</b>	<b>0,4126</b>

Sumber : [www.idx.com](http://www.idx.com) (data diolah)

Sampel dalam penelitian ini semuanya sudah mengungkapkan *corporate social responsibility* (CSR) yang dibuktikan dengan adanya laporan berkelanjutan pada masing-masing perusahaan. Namun dapat dilihat dari tabel I.2 nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang menjadi proksi untuk mengukur agresivitas pajak secara rata-rata mengalami fluktuasi. Dimana semakin kecil nilai ETR maka semakin besar tingkat agresivitas pajak Hal tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan yang menjadi sampel melakukan agresivitas pajak. Menurut Wahyudi (2015) Perusahaan yang mengungkapkan Corporate Social Responsibility, tidak seharusnya melakukan agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang sangat penting. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan (Nugraha, 2015:29).

Perusahaan yang tergolong perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kekurangan ahli dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak (Dharma dan Ardiana, 2016: 590) Menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014) dalam Muzakki (2015:22) size atau ukuran perusahaan diartikan sebagai sebuah skala dimana perusahaan dapat dikategorikan besar dan kecil dengan berbagai cara, salah satunya adalah dilihat dari besar kecilnya aset yang dimiliki. Size atau ukuran perusahaan dapat mempengaruhi *effective tax rates* (ETR) sebuah perusahaan. Semakin besar perusahaan maka akan semakin rumit dan kompleks transaksi yang

ada didalam perusahaan. Sehingga perusahaan dapat memanfaatkan banyak celah yang ada untuk meminimalkan ETR mereka.

Lanis dan Richardson (2013) mengatakan bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih besar dibanding dengan perusahaan yang lebih kecil. Karena perusahaan besar memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar yang memungkinkan untuk mengurangi beban pajak mereka.

Tabel I.2  
Ukuran Perusahaan yang menjadi  
sampel (dalam jutaan rupiah)

NO	NAMA PERUSAHAAN	2012	2013	2014	2015	2016	RATA-RATA
1	<b>BBNI</b>	19,6246	19,7730	19,8476	20,0472	20,2175	<b>19,9020</b>
2	<b>BBRI</b>	20,1279	20,2550	20,5026	20,5936	20,7269	<b>20,4412</b>
3	<b>BBTN</b>	18,5318	18,6920	18,7894	18,9619	19,1823	<b>18,8315</b>
4	<b>BDMN</b>	18,8640	19,0323	19,0927	19,0523	18,9751	<b>19,0033</b>
5	<b>BJTM</b>	17,1867	17,3134	17,4530	17,5721	17,5775	<b>17,4206</b>
6	<b>BMRI</b>	20,2701	20,4128	20,5667	20,6290	20,7612	<b>20,5280</b>
7	<b>BNGA</b>	19,1008	19,2040	19,2672	19,2913	19,3027	<b>19,2332</b>
8	<b>BNI</b>	18,5671	18,7611	18,7809	18,8757	18,9316	<b>18,7833</b>
	<b>RATA-RATA</b>	<b>19,0341</b>	<b>19,1804</b>	<b>19,2875</b>	<b>19,3779</b>	<b>19,4593</b>	<b>19,2679</b>

Sumber : [www.idx.com](http://www.idx.com) (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat ukuran perusahaan rata-rata secara konsisten mengalami kenaikan dari tahun 2012-2016. Akan tetapi nilai ETR secara rata-rata mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2012-2015 mengalami penurunan dan mengalami kenaikan pada tahun 2015-2016.

Sehubungan dengan kegiatan usaha perbankan yang bergerak dalam bidang *intermediary*, bank dapat berfungsi sebagai pihak yang melakukan agresivitas pajak dan pihak yang digunakan sebagai *channel* oleh pihak lain untuk



melakukan praktik agresivitas pajak. Adanya praktik penghindaran tersebut hingga saat ini masih sulit dideteksi berhubung adanya kerahasiaan bank.

Industri perbankan Indonesia juga tidak terlepas dari isu agresivitas pajak berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kajian pelaksanaan kewajiban perpajakan pada sektor perbankan dirasakan perlu dilakukan agar menjadi informasi awal mengenai potensi praktik penghindaran pajak di sektor perbankan.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh CSR dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak, karena adanya keterikatan yang cukup kuat antara CSR dan ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2013) menggunakan sampel Wajib Pajak Badan yang listing di Australia dari tahun 2008-2009. Sementara untuk penelitian di Indonesia sebelumnya menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-2011. Sedangkan objek penelitian ini menggunakan Wajib Pajak sektor perbankan yang listing di Indonesia pada tahun 2012-2016. Penelitian ini menggunakan pengukuran CSR yang digunakan Sembiring (2005) karena dinilai lebih sesuai dengan keadaan perusahaan Indonesia. Sementara untuk pengukuran agresivitas pajak penelitian terdahulu menggunakan 2 proksi *Effective Tax Rates* (ETR) dan *Book Tax Differences* (BTD). Penelitian ini menggunakan 1 proksi *Effective Tax Rates* (ETR).

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul “**pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak (studi empiris pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2012-2016)**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka disusunlah identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Perusahaan mengungkapkan CSR namun perusahaan melakukan agresivitas pajak.
2. Ukuran perusahaan selalu mengalami kenaikan secara rata-rata dari tahun ke tahun sementara nilai ETR mengalami fluktuasi.

## **C. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

- a. Penelitian hanya dilakukan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012-2016.
- b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak dalam penelitian ini adalah pengungkapan *Corporate social responsibility* dan ukuran perusahaan.
- c. Penulis hanya menggunakan proksi ETR (*Effective Tax Rate*) untuk mengukur tingkat agresivitas pajak perusahaan.

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah adalah :

- a. Apakah pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
- b. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

- c. Apakah pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) dan ukuran perusahaan perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. untuk mengetahui pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap agresivitas pajak
- b. untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) dan ukuran perusahaan secara bersama-sama terhadap agresivitas pajak

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai CSR, Ukuran Perusahaan dan agresivitas pajak dan juga diharapkan menjadi referensi bagi pihak akademis dan penelitian selanjutnya mengenai Corporate Social Responsibility (CSR), ukuran perusahaan dan agresivitas pajak.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR dan memberikan masukan kepada pembuat kebijakan khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengidentifikasi resiko agresivitas pajak.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Agresivitas Pajak**

###### **a. Perpajakan di Indonesia**

Menurut Sumitro (1990:5) dalam Waluyo dan Ilyas (2002:5) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Feldmann dalam Waluyo dan Ilyas (2002:5) menyatakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Smeets dalam Waluyo dan Ilyas (2002:5) menyatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Waluyo dan Ilyas ciri ciri yang melekat pada pajak adalah

###### **1. Fungsi penerimaan (*Budgeter*)**

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

## 2. Fungsi mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

Sebagai penyumbang pendapatan terbesar di Indonesia, sudah sewajarnya jika pemerintah mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan secara ketat demi memaksimalkan penerimaan dari pajak. Keseriusan pemerintah dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang telah dilakukan untuk menyesuaikan peraturan dengan perkembangan jaman. Perubahan dilakukan pada Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi UU Nomor 9 Tahun 1994, UU Nomor 16 Tahun 2000, UU Nomor 28 Tahun 2007, dan perubahan yang terbaru adalah UU Nomor 16 Tahun 2009.

Perusahaan termasuk dalam salah satu kriteria badan, dimana menjadi salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak. Badan dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak penghasilan di Indonesia sendiri diatur didalam UU No.36 Tahun 2008 yang merupakan revisi dari UU No.17 Tahun 2000, UU No.7 Tahun 1991 dan UU No.7 Tahun 1983. Tarif pajak badan mulai tahun 2010 yang diatur dalam UU

No.36 tahun 2008 Pasal 17 ayat 2a adalah sebesar 25% dari laba bersih kena pajak tanpa dikurangi oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Dalam rangka meningkatkan pendapatan dari pajak, pemerintah memberikan insentif pajak agar pengusaha dalam negeri giat dalam mengembangkan usahanya. Insentif pajak ini tertuang dalam UU No.36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 2b.

Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Sementara kegiatan CSR yang dapat menjadi tax deductible terbatas hanya untuk jenis kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. 36 tahun 2008. UU No. 36 Tahun 2008 tidak secara khusus mengatur perlakuan perpajakan untuk kegiatan CSR, akan tetapi ada beberapa aturan terkait tentang biaya-biaya yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu yang berkaitan dengan isu konsumen, pengembangan masyarakat, lingkungan, ketenagakerjaan, dan hak asasi manusia (Yoehana, 2013:30).

Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto antara lain biaya promosi, biaya beasiswa, biaya magang dan pelatihan, biaya kupon makanan dan minuman bagi pegawai kriteria dan daerah tertentu, beban pengolahan limbah, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.

## **b. Agresivitas Pajak**

Agresivitas pajak dapat didefinisikan sebagai semua upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menurunkan jumlah beban pajak dari yang seharusnya dibayar oleh perusahaan (Lanis dan Richardson, 2013). Hlaing (2012) dalam Jessica dan Toly (2014:5) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif.

Menurut Frank et al (2009) dalam Suyanto dan Supramono (2012:167), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan baik dengan cara yang legal (*tax avoidance*) maupun dengan cara ilegal (*tax evasion*). Sedangkan menurut Yoehana (2013:5) agresivitas pajak merupakan keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui aktivitas *tax planning* dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

Menurut waluyo dan Ilyas (2002:11) mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan Negara, dituntut kesadaran warga Negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Terlepas dari kesadaran sebagai warga Negara, sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal ini timbul perlawanan terhadap pajak.

Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif

1. Perlawanan pasif

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak.

Hal ini mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (*fiscus*) dengan tujuan menghindari pajak.

Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) menurut Wisanggeni dan Suharli (2017:5) secara legal memanfaatkan daerah abu-abu (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) dalam hal ini tentunya bersifat illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, dan dapat mendatangkan marabahaya bagi wajib pajak dikemudian hari.

Menurut Ilyas dan Priantara (2016:16) *tax avoidance* menurut peraturan pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik karena dianggap memiliki konotasi negative ataupun dianggap kurang nasionalis. *Tax avoidance* dilakukan dengan cara-cara atau strategi perencanaan pajak dan memanfaatkan celah atau kelemahan ketentuan perpajakan. *Tax avoidance* yang sehat dilakukan melalui strategi pajak yang tepat. Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan pelanggaran dalam bidang perpajakan sehingga tidak boleh dilakukan, karena pelaku *tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Menurut Balter didalam zain (2003:49) penghindaran pajak merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan. Sedangkan penyelundupan pajak mempunyai arti sebagai usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan.

Menurut Hidayanti (2013:14) terdapat keuntungan dan kerugian dari tindakan agresivitas pajak. Keuntungan dari melakukan agresivitas pajak, yaitu:

1. Penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik atau pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar.
2. Secara langsung maupun tidak langsung manajer mendapatkan kompensasi atau bonus dari pemilik/pemegang saham atas tindakan agresivitas pajak yang dilakukan.

Sedangkan kerugian dari tindakan agresivitas pajak diantaranya adalah:

1. Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi atau penalti dari fiskus pajak.
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak, yang menyebabkan turunnya harga saham perusahaan.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayar dengan cara yang legal, ilegal, maupun keduanya.

Salah satu cara untuk mengukur perusahaan yang melakukan agresivitas pajak yaitu dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rates* (ETR). *Effective Tax Rates* (ETR) pada dasarnya adalah sebuah besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Lanis dan Richardson (2013) menyatakan bahwa ETR

merupakan proksi yang paling banyak digunakan pada penelitian terdahulu. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil nominalnya dibandingkan penghasilan sebelum pajak.

Beberapa upaya yang bisa dilakukan wajib pajak dalam mengefisienkan pembayaran PPh Badan :

#### 1. **Memilih sistem pembukuan yang tepat**

- a. Metode Penghitungan Penghasilan dan Biaya (stelsel akrual vs stelsel kas)

Menurut stelsel akrual, penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang, jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai. Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentasi tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai dalam bidang konstruksi dan metode lain yang dipakai dalam bidang usaha tertentu seperti *build operate and transfer* (BOT) dan *real estate*.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak.

Menurut stesel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu,



serta biaya baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu.

Penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan dapat juga dinamakan stelsel campuran. Oleh karena itu, untuk penghitungan pajak Penghasilan dengan memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan.
- 2) Dalam memperoleh harta yang disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang harus dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi
- 3) Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten).

Apabila dibandingkan antara stelsel akrual dan stelsel kas, menurut versi perpajakan, dalam hal biaya administrasi biaya dan umum pada basis akrual dibebankan pada saat timbulnya kewajiban, sedangkan basis kas biaya tersebut baru dilaporkan pada saat terjadinya pembayaran. Dari segi strategi perpajakan, lebih menguntungkan memilih basis akrual daripada basis kas.

#### **b. Analisis Perbandingan Pembukuan dengan Pencatatan**

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pengecualian diberikan pada Wajib Pajak Orang Pribadi :

- 1) Yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan diperbolehkan menghitung

penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto ; dan

- 2) Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Semua wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan menyelenggarakan pembukuan, kecuali bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto tertentu diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan.

Pencatatan itu terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final, dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, pencatatan meliputi : peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya.
- 2) Bagi wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas, pencatatannya hanya mengenai : Penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek Pajak Penghasilan.
- 3) Pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Besarnya peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun wajib pajak orang pribadi yang boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma

Penghitungan Penghasilan Netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Pasal 14 ayat 2 UU Nomor 36 tahun 2008, menjadi kurang dari Rp. 4.800.000.000.000

Untuk melihat mana yang paling menguntungkan bagi wajib pajak, apakah menggunakan pembukuan atau pencatatan, berikut ini contoh analisis perbandingan pembukuan dan pencatatan.

#### Perhitungan Rugi Laba Tahun 2011

Kantor Notaris Badu

<b>Pos Perkiraan</b>	<b>Pencatatan</b>	<b>Pembukuan</b>
Penghasilan Bruto	900.000.000	900.000.000
Biaya 3M		720.000.000
Laba Bersih usaha	495.000.000	180.000.000
PTKP (mis.TK/1)	18.480.000	18.480.000
Penghasilan Kena Pajak	476.520.000	161.520.000
PPh Terutang	23.836.000	8.076.000

Norma penghitungan Penghasilan neto untuk Notaris di Jakarta = 55%

Perhitungan penghasilan neto notaris di Jakarta dengan Norma 55% :  $55\% \times$

Rp 900.000.000 = Rp 495.000.000

Bila diasumsikan *rate of return* adalah 15%, maka laba bersih usaha (pembukuan) =  $15\% \times$  Rp 900 juta = Rp 180 juta

Dari contoh perhitungan diatas, lebih menguntungkan bagi Notaris Badu membuat pembukuan daripada harus menggunakan norma penghitungan

penghasilan neto dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena PPh terutanganya lebih rendah.

Keuntungan menyelenggarakan pembukuan dapat dilihat dari perbandingannya dengan pencatatan berikut ini :

Uraian	Pencatatan	Pembukuan
Harga Pokok dan biaya usaha	Tidak Boleh Diperhitungkan	Bisa diperhitungkan (Pengeluaran yang <i>deductible</i> )
Kompensasi kerugian	Tidak Boleh Diperhitungkan	Bisa dikompensasikan ke tahun berikutnya
Penetapan Penghasilan Kena Pajak	Sesuai Norma Penghitungan Penghasilan Neto	Sesuai kondisi riil : penghasilan pengeluaran <i>deductible</i>
Bila perusahaan mengalami kerugian	PPh tetap harus dibayar sesuai norma	PPh nihil

**c. Pemilihan Metode Penyusutan aktiva tetap dan amortisasi atas aktiva tidak berwujud**

Metode penyusutan aktiva tetap diatur dalam PSAK NO.16 berbeda dengan akuntansi komersial yang memperbolehkan perusahaan menggunakan metode garis lurus (*straight line methode*), metode saldo menurun (*diminishing balance method*), metode jumlah unti (*sum of the unit method*), metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset, maka untuk tujuan perpajakan perusahaan hanya boleh memilih metode garis lurus atau metode saldo menurun.

Sesuai pasal 11 Undang Nomor 7 tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, di mana metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan ini, dilakukan dengan:

1) Metode garis lurus atau *straight line method*

Metode ini menghasilkan pembebanan yang tetap selama masa umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah; atau

2) Metode saldo menurun atau *diminishing balance method*

Metode ini menghasilkan pembebanan yang menurun selama masa umur manfaat dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku.

Masing-masing metode penyusutan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya dan pilihan penggunaannya tergantung pada kepentingan pemakainya (*user*)

Misalnya untuk kepentingan pemegang saham (*dividen*) lebih cenderung menggunakan metode penyusutan garis lurus karena akan lebih menguntungkan bagi wajib pajak dari segia laba komersialnya.

Dibandingkan dengan metode garis lurus, metode saldo menurun akan menghasilkan beban penyusutan lebih besar pada tahun awal pembelian atau perolehan aktiva tetap dan kemudian akan makin menurun pada tahun-tahun berikutnya (walaupun pada akhir umur ekonomis aktiva tersebut jumlah akumulasi penyusutan kedua metode tersebut akan sama) sehingga perolehan profit pada tahun pertama akan lebih rendah. Namun bila kedua metode tersebut dilihat dari *future value* atas penyusutan fiskalnya, maka hasilnya akan berbeda.

**d. Memilih Metode Penilaian Persediaan**

Sesuai pasal 10 ayat (6) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan, di mana metode penilaian persediaan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan.
- 2) Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama (FIFO).
- 3) Penggunaan metode penilaian persediaan harus dilakukan secara taat asas.

**e. pemilihan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau cash.**

Pemberian natura atau kenikmatan untuk kesejahteraan karyawan tidak cocok dalam kondisi sebagai berikut :

- 1) Pada perusahaan yang sedang menderita kerugian.
- 2) Pada perusahaan yang dikenakan PPh badan secara final.

Terdapat banyak cara untuk mengoptimalkan kesejahteraan karyawan, dengan memanfaatkan peluang efisiensi beban pajak yang berkaitan dengan pengeluaran biaya berikut ini:

- 1) PPh pasal 21 karyawan

Pilihan terhadap metode PPh 21 Pasal 21 karyawan dapat berupa :

- a) Bila beban PPh Pasal 21 sepenuhnya menjadi tanggungan karyawan.
- b) Bila karyawan diberi tunjangan PPh pasal 21.
- c) Bila PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan.

## 2) Pengobatan/kesehatan karyawan

Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam memberikan fasilitas pengobatan untuk kesehatan karyawannya.

- a) *Reimbursement* kwitansi biaya medikal dari dokter/klinik/rumah sakit.
- b) Karyawan diberi tunjangan pengobatan atau kesehatan (*mediccal allowance*) setiap bulan, sakit maupun tidak sakit.
- c) Karyawan berobat di rumah sakit/klinik/dokter langganan dan pengembalian obat dari apotik langganan.
- d) Perusahaan mendirikan rumah sakit/klinik berikut dokter.

## 3) Pembayaran Premi asuransi untuk pegawai

Sesuai pasal 6 ayat (1) a UU PPh No. 36 Tahun 2008, pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan (*deductible*), tetapi bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan (*taxable*).

## 4) Iuran Pensiun dan Iuran JHT/THT yang dibayar oleh perusahaan

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

## 5) Perumahan untuk karyawan

Beberapa alternative fasilitas perumahan yang diberikan oleh perusahaan karyawannya untuk kesejahteraan karyawannya :

- a) Penempatan pada rumah dinas yang dibuat/dibeli oleh perusahaan
- b) Penempatan pada rumah dinas yang disewa oleh perusahaan

- c) Perusahaan memberikan penggantian sewa rumah dinas yang dibayar oleh karyawan, penggantian ini dimasukkan ke dalam tunjangan perumahan bagi pegawai
- d) Perusahaan memberikan tunjangan perumahan kepada karyawan

#### *Perlakuan Perpajakan*

Dasar acuannya adalah pasal 4 (3) huruf d jo pasal 9 ayat 1 huruf d UU No 7 tahun 1983 yang telah diubah terakhir kalinya dengan UU No 36 tahun 2008 tentang PPh, yakni :

- a) Pembayaran untuk pekerjaan/jasa dalam bentuk natura kepada karyawan tidak dapat dipotongkan sebagai biaya perusahaan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak dari perusahaan yang bersangkutan, sedangkan bagi karyawan yang menerima pemberian tersebut tidak merupakan penghasilan
- b) Jika diberikan dalam bentuk uang, maka apa yang diterima oleh karyawan yang bersangkutan merupakan penghasilan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan merupakan biaya.

#### 6) Transportasi untuk Karyawan

Dasar pengaturannya adalah Surat Dirjen Pajak No.S-1215/PJ.23/1984 yang ditegaskan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.42/PJ.23/1984, dengan menyatakan bahwa masalah transportasi secara keseluruhan telah diatur dalam Surat Direktur Jenderal Pajak kepada Menteri Tenaga Kerja R.I tanggal 7 Juni 1984 nomor S-336/PJ.23/1984, yang intinya adalah sebagai berikut :

- a) Biaya eksploitasi kendaraan antar jemput karyawan merupakan biaya perusahaan dan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan.



- b) Seluruh biaya eksploitasi dan depresiasi untuk kendaraan perusahaan yang dikuasai/dipegang oleh karyawan tertentu/dibawa pulang setelah jam kerja merupakan biaya perusahaan dan bagi karyawan bukan merupakan penghasilan karena merupakan kenikmatan.
- c) Tunjangan transport yang diberikan kepada karyawan untuk keperluan pergi dan pulang kantor merupakan penghasilan bagi karyawan dan biaya bagi perusahaan.
- d) Biaya dalam rangka menjalankan tugas perusahaan, misalnya biaya transport, hotel, dan sebagainya merupakan biaya perusahaan dan bukan penghasilan karyawan, sepanjang jumlahnya tidak mengandung unsur pengeluaran untuk keperluan pribadi.

7) Pakaian seragam untuk Karyawan

Kriteria yang diisyaratkan oleh fiskus mengenai pemberian natura ini adalah sebagai berikut :

- a) Pemberian natura yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya adalah :
  - 1) Pemberian/penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
  - 2) Penggantian/imbalan dalam bentuk natura / kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan didaerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan didaerah tersebut.

3) Pemberian natura/kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.

b) Pemberian natura yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja/karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, meliputi pakainya dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam satpam. Pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan keamanan/keselamatan pekerja yang diwajibkan oleh Departemen tenaga kerja dan transmigrasi/pemerintah daerah setempat (Peraturan Dirjen Pajak No. PER-51/PJ./2009)

#### 8) Perjalanan Dinas Karyawan

Biaya dalam rangka menjalankan tugas perusahaan, misalnya biaya tiket pesawat, hotel, transportasi, dan sebagainya merupakan biaya perusahaan dan bukan penghasilan karyawan, sepanjang jumlahnya tidak mengandung unsur-unsur untuk keperluan pribadi.

Namun, dalam praktiknya, ada pemberian uang saku (*travelling Allowence*) yang didalamnya terdapat komponen biaya perjalanan dinas, dan karena pemberian ini dibayarkan secara tunai sebagai uang saku, maka pemberian tersebut dikategorikan sebagai penghasilan bagi karyawan yang bersangkutan. Bila perusahaan menginginkan agar *travelling allowence* tersebut dapat dibiayakan (*deductable*) dalam laporan keuangan fiskal perusahaan, maka *travelling allowence* tersebut harus dimasukkan dalam SPT PPh Pasal 21 atas nama karyawan yang bersangkutan sebagai unsur tambahan penghasilannya yang dikenai PPh Pasal 21.

#### 9) Bonus dan jasa Produksi

Ada beberapa trik yang harus diperhatikan dalam pemberian bonus dan gratifikasi, *tantiem* dan jasa produksi kepada komisaris, direksi, atau pegawai sebagai berikut :

- a) dalam pemberian bonus dan gratifikasi, *tantiem* dan jasa produksi tersebut, bisa diperlakukan sebagai biaya perusahaan bilamana dibebankan dalam biaya tahun berjalan. Namun bila dibebankan ke dalam pos laba ditahan, maka tidak bisa diakui sebagai biaya perusahaan.
- b) *Tantiem* adalah bagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris dari pemegang saham yang didasarkan kepada persentase tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak, tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan kena Pajak dan bagi penerimanya merupakan penghasilan dan dikenakan PPh Pasal 21.
- c) Untuk keperluan perencanaan pajak, harus dihindari pembayaran gaji, bonus, gratifikasi jasa produksi yang melebihi kewajaran kepada pemegang saham yang juga menjadi komisaris atau pegawai karena pembayaran tersebut merupakan dividen dan tidak boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan, sehingga dipotong PPh Pasal 25/26.

#### 10) Pemberian Natura di daerah tertentu dan atau terpencil

Pemberian natura atau kenikmatan di daerah tertentu/terpencil, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2009 dan Peraturan Dirjen Pajak No.51/PJ./2009.

- a) Pengertian daerah tertentu atau terpencil:

- 1) Daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanaman modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang.
  - 2) Termasuk daerah perairan laut dengan kedalaman lebih dari 50m yang di dasar lautnya memiliki cadangan mineral.
- b) Pemberian natura atau kenikmatan yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah:
- 1) Pemberian atau penyediaan makanan dan/ atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, meliputi:
    - a) pemberian makanan dan/ atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja.
    - b) pemberian kupon makanan dan/ atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian, meliputi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya.
  - 2) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerahh tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.
- c) Penggantian atau imbalan adalah sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk:

- 1) tempat tinggal, termasuk perumahan bagi Pegawai dan keluarganya;
  - 2) pelayanan kesehatan;
  - 3) pendidikan bagi Pegawai dan keluarganya;
  - 4) peribadatan;
  - 5) pengangkutan bagi Pegawai dan keluarganya;
  - 6) olahraga bagi Pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, *power boating*, pacuan kuda, dan terbang layang, sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri.
  - 7) Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, meliputi; pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antat jemput pegawai, serta penginapan untuk awak kapal, dan yang sejenisnya.
- d) Pengeluaran perusahaan dalam bentuk natura di atas bukan merupakan penghasilan karyawan.
- e) Penetapan daerah tertentu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang berlaku sejak tahun pajak diterbitkannya keputusan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Jangka waktu perpanjangan adalah 5 (lima) tahun.
- f) Permohonan keputusan tentang penetapan daerah tertentu/terpencil diajukan kepada Kantor Wilayah DJP yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar.

## **f. Faktor-Faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak**

Menurut Ari Budi Kristanto, faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah sebagai berikut :

- 1) *Corporate social responsibility*
- 2) Ukuran Perusahaan
- 3) *Inventory Intensity*
- 4) *Capital Intensity*
- 5) Leverage
- 6) *Return On Asset*
- 7) Kepemilikan pemerintah
- 8) Kepemilikan manajerial
- 9) *Good Corporate Governance* ,dll

## **2. Corporate Social Responsibility**

### **a. Definisi Corporate Social Responsibility**

Menurut Solihin (2009:1) sebagaimana ditekankan oleh Bowen, kewajiban atau tanggung jawab sosial dari perusahaan bersandar pada keselarasan dengan tujuan (*objectives*) dan nilai-nilai (*values*) dari suatu masyarakat. Kedua hal yang telah disebutkan oleh Bowen, yakni keselarasan dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat merupakan dua premis dasar tanggung jawab sosial. Premis pertama, perusahaan bisa mewujudkan dalam suatu masyarakat karena adanya dukungan dari masyarakat.

Oleh sebab itu, perilaku perusahaan dan cara yang digunakan perusahaan saat menjalankan bisnis harus berada dalam bingkai pedoman yang ditetapkan masyarakat. Dalam hal ini, seperti halnya pemerintah, perusahaan memiliki

kontrak sosial (*social contract*) yang berisi sejumlah hak dan kewajiban. Kontrak sosial itu akan mengalami perubahan sejalan dengan perubahan kondisi masyarakat. Namun, apapun perubahan yang terjadi, kontrak sosial tersebut tetaplah merupakan dasar bagi legitimasi bisnis. Kontrak sosial ini pula yang menjadi wahana bagi perusahaan untuk menyesuaikan berbagai tujuan perusahaan dengan tujuan-tujuan masyarakat yang pelaksanaannya dimanifestasikan dalam bentuk tanggung jawab perusahaan.

Premis kedua yang mendasari tanggung jawab sosial adalah bahwa pelaku bisnis bertindak sebagai agen moral (*moral agent*) dalam suatu masyarakat. Pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan dengan posisi puncak diperusahaan senantiasa melibatkan pertimbangan nilai atau mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki oleh manajemen puncak. Oleh sebab itu nilai yang dimiliki masyarakat, perusahaan harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Premis kedua ini memuat dimensi etika dari tanggung jawab sosial.

*The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 memberikan definisi CSR sebagai:

*Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.*

Menurut Ebert dan Griffin (2002:45) etika mempengaruhi perilaku pribadi ditempat kerja. Tanggung jawab sosial (*social responsibility*) adalah konsep terkait yang merujuk pada keseluruhan cara suatu bisnis dalam upayanya untuk menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan individu terkait dalam lingkungan sosialnya. Kelompok dan individu ini sering disebut juga pemegang/pemangku kepentingan organisasi (*organizational stakeholders*), yang

meliputi kelompok, individu, dan organisasi yang langsung terpengaruh oleh praktik-praktik suatu organisasi sehingga berkepentingan terhadap kinerja organisasi yang bersangkutan.

**b. *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure***

Sembiring (2005) menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Selain itu menurut Deegan (2002) dalam Lanis dan Richardson (2013) menyatakan bahwa pengungkapan CSR dipandang sebagai sarana yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas untuk mempengaruhi persepsi.

Pengungkapan CSR perusahaan dapat melalui berbagai macam media seperti laporan tahunan dan website perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para *stakeholder* dan juga untuk menjaga reputasi.

Menurut Kartini (2009:56) Implementasi CSR membutuhkan pelaporan yang berguna dalam menginformasikan serta mengomunikasikan plus bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Untuk pelaporan CSR begitu strategis dalam menginisiasi opini stake holder agar meningkatkan reputasi perusahaan secara nyata. Alur pelaporan CSR berawal dari suatu perusahaan sadar akan dampak dari operasional yang mereka lakukan kemudian berinisiatif melakukan sesuatu, dalam hal ini berupa perencanaan program CSR plus budget yang berguna untuk mengoptimalkan nilai lebih serta meminimalisir dampak buruk, yang seterusnya hasil inisiatif plus aktivasi tersebut harus dibuat suatu pelaporan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan.



Media penyampaian laporan tersebut bisa berupa pemberitahuan diportal perusahaan, bisa disatukan dengan laporan kinerja tahunan perusahaan, bisa juga disampaikan di forum-forum formal seperti seminar, diskusi dan konferensi. Dengan kata lain pelaporan CSR berperan besar bagi perusahaan untuk mempublikasikan praktikal-praktikal CSR mereka kepada *stakeholder* secara taktis, komprehensif, dan berkelanjutan.

Dalam penggalangan informasi menyangkut aktivitas CSR suatu perusahaan membutuhkan usaha yang sangat ekstra dan membutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam penyusunannya. Hal ini yang membuat *CSR Reporting* wajib terlihat komprehensif serta focus, maka dari itu banyak hasil publikasi dari *CSR Reporting* dimuat dalam puluhan lembar halaman bahkan ada sampai seratus halaman lebih, dan laporan tersebut sangat detail karena menyangkut penonjolan reputasi perusahaan yang mempublikasikan *CSR Reporting*.

Menurut Yoehana (2013:20) sebagian perusahaan bahkan menganggap bahwa mengomunikasikan kegiatan atau program CSR sama pentingnya dengan kegiatan CSR itu sendiri. Dengan mengomunikasikan CSR-nya, makin banyak masyarakat yang mengetahui investasi sosial perusahaan sehingga tingkat risiko perusahaan menghadapi gejolak sosial akan menurun.

Menurut Wibisono (2007) dalam Jessica dan Toly (2014:4) ada 10 keuntungan ketika perusahaan melakukan pengungkapan CSR, yaitu sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan image perusahaan
2. Layak mendapatkan social license to operate
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan
4. Melebarkan akses sumber daya

5. Membentangkan akses menuju market
6. Mereduksi biaya
7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator (pemerintah)
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan
10. Peluang mendapatkan penghargaan

Menurut Yoehana (2013:22) di Indonesia, sampai sejauh ini belum ada standar khusus yang mengatur tentang pelaporan pertanggungjawaban sosial (CSR *disclosure*). Hal ini disebabkan karena sulitnya mengukur biaya dan manfaat sosial perusahaan di masa depan. Sehingga perusahaan dapat merancang sendiri bentuk pelaporan pertanggungjawaban sosialnya pada publik atau dengan mengadopsi pedoman yang telah umum digunakan .

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah indikator yang dipakai oleh Sembiring (2005) yang terdiri atas tujuh kategori, yaitu lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. Ketujuh kategori tersebut terbagi dalam 90 item pengungkapan.

Berdasarkan peraturan Bapepam No. VIII.G.2 tentang laporan tahunan dan kesesuaian item tersebut untuk diaplikasikan di Indonesia, maka penyesuaian kemudian dilakukan. Dua belas item dihapuskan karena kurang sesuai untuk diterapkan dengan kondisi di Indonesia sehingga secara total tersisa 78 item pengungkapan. Skala pengukuran untuk pengungkapan CSR digunakan pengukuran dengan skala nominal (*dummy*), yaitu setiap item CSR dalam instrument penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan dan nilai 0 jika tidak

diungkapkan. Lalu, skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan.

Dengan menggunakan instrumen pengukuran yang mengacu pada instrumen yang digunakan oleh Sembiring (2005), diharapkan akan lebih banyak item pengungkapan yang dapat teridentifikasi dalam penelitian ini. Sehingga akan lebih dapat menggambarkan bagaimana pengaruh pengungkapan CSR perusahaan di Indonesia terhadap agresivitas pajak.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pelaksanaan program CSR melibatkan beberapa pihak yaitu perusahaan, pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat, perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat, serta calon penerima manfaat CSR. Oleh sebab itu dalam implementasi program CSR diperlukan beberapa kondisi yang akan menjamin terlaksananya implementasi program CSR dengan baik. Kondisi pertama, implementasi CSR memperoleh persetujuan dan dukungan dari pihak yang terlibat. Sebagai contoh implementasi CSR harus memperoleh persetujuan dan dukungan dari manajemen puncak perusahaan sehingga pelaksanaan program CSR didukung sepenuhnya oleh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya financial dalam bentuk penyediaan anggaran untuk pelaksanaab CSR maupun sumber daya manusia yakni para karyawan perusahaan yang diterjunkan perusahaan untuk pelaksanaan program CSR.

Kondisi kedua yang harus diciptakan untuk menunjang keberhasilan implementasi program CSR adalah ditetapkannya pola hubungan (*relationship*) diantara pihak-pihak yang terlibat secara jelas. Hal ini akan meningkatkan kualitas koordinasi pelaksanaan program CSR.

Kotler dan Lee (2005) dalam Solihin (2008:5) memberikan rumusan :

*“corporate social responsibility is a commitment to improve community well being through discretionally business practices and contribution of corporate resources”*

Dalam definisi tersebut, Kotler dan Lee memberikan penekanan pada kata *discretionary* yang berarti kegiatan CSR semata-mata komitmen perusahaan secara sukarela untuk turut meningkatkan kesejahteraan komunitas dan bukan merupakan aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum dan perundang-undangan seperti kewajiban untuk membayar pajak atau kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Kata *discretionary* juga memberikan nuansa bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas CSR haruslah perusahaan yang telah menaati hukum dalam pelaksanaan bisnisnya. Hal tersebut berarti sangatlah tidak tepat bila kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan hanya menjadi semacam kosmetik untuk menyembunyikan praktik perusahaan yang tidak baik dalam memperlakukan karyawan atau melakukan berbagai kecurangan baik dalam pembuatan laporan keuangan maupun kecurangan terhadap lingkungan hidup.

### **c. Teori Legitimasi**

Menurut Ratmono dan Sagala (2015:11), teori legitimasi didasarkan pada adanya fenomena kontrak sosial antara sebuah organisasi dengan masyarakat, dimana diperlukan sebuah tujuan organisasi tersebut seharusnya kongruen dengan nilai-nilai yang ada didalam sebuah masyarakat. Menurut teori ini, tindakan organisasi haruslah mempunyai aktivitas dan kinerja yang dapat diterima oleh masyarakat.

Sedangkan menurut Gray, et al (1996) dalam Octaviana (2014:12), teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Wood (1991:696) dalam Solihin (2008:108) menjelaskan adanya tiga prinsip CSR dimana ketiga prinsip ini disesuaikan dengan orientasi pelaksanaan prinsip CSR salah satunya adalah *the principle of legitimacy*. Prinsip ini didasari oleh adanya legitimasi dan pemberian kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat kepada pelaku bisnis untuk menjalankan operasi perusahaan, menggunakan berbagai jenis sumber daya, serta memasarkan produk yang mereka hasilkan. Dalam jangka panjang, perusahaan yang menggunakan kekuasaan secara tidak bertanggung jawab menurut kacamata masyarakat, akan cenderung kehilangan legitimasinya dari masyarakat. Bentuk hilangnya legitimasi masyarakat dapat berkisar dari tidak mengonsumsi produk yang dihasilkan perusahaan atau desakan masyarakat agar perusahaan menghentikan operasinya sama sekali. Prinsip ini diterapkan pada tingkat institusi industri dan dianggap sebagai kewajiban genrik perusahaan terhadap masyarakat. Prinsip ini menurut Wood bersumber dari pemikiran Davies mengenai *Iron of Responsibility*.

Menurut Deegan dan Brown (1996) dalam Ratmono dan Sagala (2015:19) aktivitas CSR dilakukan perusahaan untuk menunjukkan sistem nilai perusahaan telah selaras dengan sistem sosial dimana perusahaan tersebut beroperasi. Berdasarkan teori ini dapat diajukan argumen bahwa pengungkapan CSR dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dimana

perusahaan berada. Legitimasi ini menyebabkan perusahaan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Teori legitimasi menyatakan organisasi bukan hanya memperhatikan hak-hak investor tetapi juga memperhatikan hak publik.

#### **d. Teori Stakeholder**

Menurut Branco dan Rodrigues (2007) dalam Yoehana (2013:16) Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang mengharuskan mereka untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak tindakan mereka. Manajemen seharusnya tidak hanya mempertimbangkan pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga siapa saja yang dipengaruhi oleh keputusan bisnis.

Menurut Solihin (2009:2) untuk memenuhi kontrak sosialnya terhadap masyarakat, perusahaan dihadapkan pada beberapa tanggung jawab secara simultan. Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan (Post et al.,2002: 8).

Jones (1995) dalam Solihin (2009:2) selanjutnya mengklasifikasi pemangku kepentingan tersebut kedalam 2 (dua) kategori, yaitu :

- a. *Inside stakeholders*, terdiri atas orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada didalam

organisasi perusahaan. Yang termasuk kedalam kategori inside stakeholder adalah pemegang saham, para manajer, dan karyawan.

- b. *Outside stakeholders*, terdiri atas orang-orang maupun pihak-pihak (*constituencies*) yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan dan bukan pula karyawan perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang termasuk kedalam kategori ini adalah pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat lokal, dan masyarakat secara umum.

Pemerintah sebagai regulator, merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemerintah. Salah satunya adalah dengan cara mengikuti semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah, ketaatan membayar pajak, dan tidak melakukan tindakan pajak agresif karena dianggap tidak bertanggung jawab sosial.

### **3. Ukuran Perusahaan (*size*)**

Menurut Nugraha (2015:29) ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang sangat penting. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik yang penting. Perusahaan yang besar tentu akan menjaga image dengan mengungkapkan informasi yang akurat dan relevan dan tentu saja akan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat sehingga mendapatkan kesan yang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Cho et al (2010) dalam Lanis

dan Richardson (2013) yang mengatakan bahwa perusahaan dengan skala besar akan mengungkapkan CSR lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil dalam laporan tahunan dikarenakan visibilitas yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan hal yang positif terkait dengan pengungkapan CSR (Patten 1992, 2002 ; Hackston dan Milne,1996; Clarkson et al, 2008; Cho et al,2010 dalam Lanis dan Richardson, 2013).

Cahyono, et al (2016:4) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata – rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu large firm, medium firm and small firm. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Menurut Jogiyanto (2000) ukuran perusahaan ditunjukkan melalui log total aktiva, dinilai lebih baik karena ukuran perusahaan ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode satu dengan periode berikutnya. Sedangkan menurut Mindra dan Erawati (2015) ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung resiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan.

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar usaha yang dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat. Oyelere, Wang dan Song (2011)



dalam Nugraha (2015:29) menjelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin disorot oleh stakeholder. Dengan demikian, perusahaan harus bekerja lebih keras untuk memperoleh legitimasi dari stakeholder sebagai langkah penyesuaian aktivitas perusahaan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Menurut Dharma dan Ardiana (2016:590) dalam Rina (2016), pengaruh perusahaan dalam membayar pajak juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Besar kecilnya aset juga memengaruhi jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan juga akan terpengaruh. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki aset besar akan memengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan.

Perusahaan yang tergolong perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kekurangan ahli dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak (Dharma dan Ardiana, 2016: 590) Menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014) dalam Muzakki (2015: 22) size atau ukuran perusahaan diartikan sebagai sebuah skala dimana perusahaan dapat dikategorikan besar dan kecil dengan berbagai cara, salah satunya adalah dilihat dari besar kecilnya aset yang dimiliki. Size atau ukuran perusahaan dapat mempengaruhi effective tax rates (ETR) sebuah perusahaan. Semakin besar perusahaan maka akan semakin rumit dan kompleks transaksi yang ada didalam perusahaan. Sehingga perusahaan dapat memanfaatkan banyak celah yang ada untuk meminimalkan ETR mereka.

Lanis dan Richardson (2013) mengatakan bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih besar dibanding dengan perusahaan yang lebih kecil. Karena perusahaan besar memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar yang memungkinkan untuk mengurangi beban pajak mereka.

#### 4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dimana perbedaan penelitian ini terlihat pada tempat dan waktu penelitian dilakukan, penelitian terdahulu ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.1

#### Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Hasil penelitian
Lanis dan Richardson (2013)	<i>Is corporate social responsibility performance associated with tax avoidance?</i>	Variabel dependen: agresivitas pajak (ETR) Variabel independen: CSR	Memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan
Yoehana (2013)	Analisis pengaruh <i>corporate social responsibility</i> terhadap agresivitas pajak	Variabel Independen: CSR. Variabel Dependen: Agresivitas Pajak.	CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
L. Watson (2012)	<i>Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance, and Tax Aggressiveness</i>	Variabel Dependen: agresivitas pajak (ETR) Variabel Independen: CSR.	Memberikan bukti empiris bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Alfiyani Nur Hidayanti dan Herry Laksito (2013)	Pengaruh antara Kepemilikan Keluarga dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Tindakan Pajak Agresif.	Variabel Dependen: agresivitas pajak ( <i>effective tax rate, cash effective tax rate, book-tax difference Manzon-Plesko, book-tax difference Desai-Dharmapala dan tax planning</i> ). Variabel Independen: kepemilikan keluarga dan <i>corporate governance</i> .	Menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Sementara tata kelola perusahaan ( <i>corporate governance</i> ) memiliki dampak yang signifikan terhadap tindakan pajak agresif.
Nona Fajar Rina (2016)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate social responsibility</i> (CSR), ukuran perusahaan ( <i>size</i> ), <i>leverage</i> , <i>return on asset</i> (ROA), dan kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak. (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015)	Variabel dependen : agresivitas pajak ( <i>effective tax rate</i> ) Variabel Independen : pengungkapan <i>Corporate social responsibility</i> (CSR), ukuran perusahaan ( <i>size</i> ), <i>leverage</i> , <i>return on asset</i> (ROA), dan kepemilikan keluarga	Menunjukkan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, ukuran perusahaan ( <i>size</i> ) tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Variabel <i>return on asset</i> (ROA) berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Secara parsial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian tentang CSR telah banyak dilakukan, demikian juga dengan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, masih sedikit penelitian

yang menghubungkan antara pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan dengan agresivitas pajak.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh CSR dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak, karena adanya keterikatan yang cukup kuat antara CSR dan ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2013) menggunakan sampel Wajib Pajak Badan yang listing di Australia dari tahun 2008-2009. Sementara untuk penelitian di Indonesia sebelumnya menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-2011. Sedangkan objek penelitian ini menggunakan Wajib Pajak sektor perbankan yang listing di Indonesia pada tahun 2012-2016. Penelitian ini menggunakan pengukuran CSR yang digunakan Sembiring (2005) karena dinilai lebih sesuai dengan keadaan perusahaan Indonesia. Sementara untuk pengukuran agresivitas pajak penelitian terdahulu menggunakan 2 proksi *Effective Tax Rates* (ETR) dan *Book Tax Defferences* (BTD). Penelitian ini menggunakan 1 proksi *Effective Tax Rates* (ETR).

## **B. Kerangka Konseptual**

*Corporate social responsibility* adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan memiliki berbagai tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

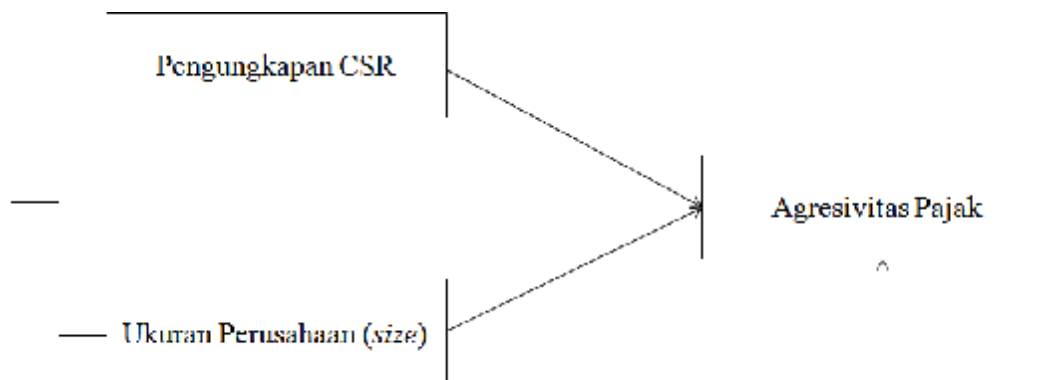
CSR penting untuk diungkapkan perusahaan agar perusahaan agar tetap *going concern*, sementara agresivitas pajak yang dilakukan merupakan aktivitas yang tidak bertanggung jawab secara sosial.

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan di sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya Hal inilah yang menyebabkan perusahaan berusaha melakukan agresivitas pajak dengan meminimalisasi beban pajak baik secara legal maupun ilegal. Jika perusahaan mengungkapkan CSR maka perusahaan tidak seharusnya melakukan agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan

Ukuran perusahaan mempengaruhi *effective tax rate* (ETR) semakin besar perusahaannya maka semakin besar pula tingkat agresivitas pajaknya dibanding perusahaan yang lebih kecil. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang lebih besar memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar juga untuk mengurangi beban pajak mereka.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan pada gambar berikut:



Gambar II.1  
Kerangka Konseptual

### C. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan uraian teoritis dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengungkapan *corporate sosial responsibility* (CSR) memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.
3. Pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) dan ukuran perusahaan bersama sama memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif kausal. Penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain.

### B. Definisi Operasional

#### 1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (sugiyono, 2016:39). Variabel independen pada penelitian ini adalah :

##### a. Pengungkapan *Corporate social Responsibility*

Pengukuran ini dilakukan dengan mencocokkan item pada check list dengan item yang diungkapkan perusahaan. Apabila item y diungkapkan maka diberikan nilai 1, jika item y tidak diungkapkan maka diberikan nilai 0 pada check list. Setelah mengidentifikasi item yang diungkapkan oleh perusahaan di dalam laporan berkelanjutan (*sustainability report*), serta mencocokkannya pada check list, hasil pengungkapan item yang diperoleh dari setiap perusahaan dihitung indeksnya dengan proksi CSRI.

Adapun rumus untuk menghitung CSRI sebagai berikut:

$$CSRI_i = \frac{\sum X_{yi}}{n_i}$$

Dimana :

CSRI<sub>i</sub> : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan i

$\sum X_{yi}$  : Nilai 1 = jika item y diungkapkan; 0 = jika item y tidak diungkapkan.

N<sub>i</sub> : Jumlah item untuk perusahaan I,  $n_i \leq 78$

### b. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik yang penting dan merupakan variabel penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari total aset yang dimiliki. Menurut Lanis dan Richardson (2013) ukuran perusahaan dapat diukur dengan natural logaritma total aset dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SIZE} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

## 2. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen (sugiyono, 2016:39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara yang legal, ilegal, maupun kedua-duanya. Penelitian ini mengukur agresivitas pajak dengan menggunakan proksi *Effective Tax rates* (ETR) yang dihitung dari:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

ETR menggambarkan presentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak yang



diperoleh perusahaan. ETR diukur dengan menggunakan proksi model Lanis dan Richardson (2013).

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

#### 2. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Nov 2017				Des 2017				Jan 2018				Feb 2018				Mar 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Pembuatan Proposal																				
3.	Bimbingan Proposal																				
4.	Seminar Proposal																				
5.	Bimbingan Skripsi																				
6.	Sidang Meja Hijau																				

### D. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan (Arfan Ikhsan dkk, 2014:105). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan

sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016 yaitu sebanyak 43 perusahaan.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut. Ketika peneliti melakukan penarikan sampel, peneliti tentunya merasa tertarik dalam mengestimasi satu atau lebih nilai-nilai populasi atau menguji satu atau lebih hipotesis statistik (Arfan Ikhsan dkk, 2014:106 ). Pemilihan sampel berdasarkan metode *purposive sampling* karena teknik pengambilan sampel perusahaan dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. Perusahaan perbankan yang listing di bursa efek Indonesia.
- b. Perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan berkelanjutan (*sustainability reports*).
- c. Perusahaan perbankan yang tidak mengalami kerugian.

Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditetapkan diatas dari 43 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperoleh 8 sampel perusahaan mulai tahun 2012-2016. Dari total 43 perusahaan dikurangi 35 perusahaan yang tidak memenuhi kriteria.

Tabel III.1

### Daftar perusahaan yang menjadi sampel

No.	Kode Efek	Nama Emiten
1	BBNI	PT. Bank Negara Indonesia Tbk.
2	BBRI	PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.
3.	BBTN	PT. Bank Tabungan Negara Tbk.
4	BDMN	PT. Bank Danamo Indonesia Tbk.

5	BJTM	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
6	BMRI	PT. Bank Mandiri Tbk.
7	BNGA	PT. Bank Cimb Niaga
8	BNII	PT. Bank Internasional Indonesia Tbk.

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

## E. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2016 dan *sustainability report* yang diperoleh dari website perusahaan.

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Teknik Dokumentasi

Yaitu dengan cara mengumpulkan data berupa laporan keuangan dan laporan berkelanjutan setiap perusahaan periode penelitian (2012-2016).

### 2. Metode studi pustaka

Yaitu dengan melakukan telaah pustaka, eksplorasi dan mengkaji berbagai literature pustaka seperti buku-buku, jurnal, masalah, literatur, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa analisis, yang diuraikan sebagai berikut :

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik dekriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan, atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Analisis ini umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa : frekuensi, tendensi sentral ( rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standar dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian. Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif tergantung pada tipe skala pengukuran construct yang digunakan dalam penelitian (Ikhsan, Arfan dkk, 2014:150)

## 2. Analisis Regresi Linear Berganda

### a. Persamaan Regresi

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda ini menggunakan alat bantu *Statistical Package For Social Science* (SPSS). Secara sistematis persamaan dalam regresi linear berganda ini dapat dilihat model matematis sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Dimana :

Y : Agresivitas pajak sebagai variabel dependen

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$  : Koefisien regresi

X<sub>1</sub> : Pengungkapan corporate social responsibility perusahaan i

$X_2$  : Capital intensity

$\varepsilon$  : Error

Sebelum model regresi digunakan untuk menguji hipotesis, tentunya model tersebut harus bebas dari gejala asumsi klasik karena model yang baik harus memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Oleh karena itu, dalam analisis regresi linier berganda ini, dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

Uji asumsi klasik merupakan tahap yang harus dilakukan sebelum uji hipotesis. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui adanya kemungkinan normalitas, linieritas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Jika asumsi ini dilanggar maka uji hipotesis menjadi bias.

#### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas yaitu suatu pengujian untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak (Azuar dkk, 2013:169). Pengujian normalitas distribusi data populasi dilakukan dengan menggunakan statistic Kolmogorov-Smirnov. Data populasi dikatakan berdistribusi normal jika koefisien Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ .

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen (Azuar dkk, 2013:170). Cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan melihat nilai faktor inflasi varian (*variance inflasi factor*), Apabila nilai VIF lebih kecil

dari 10,00 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas terhadap data yang diuji.

### c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu periode  $t-1$  (sebelumnya) (Azuar dkk, 2013:173). Pengujian autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin - Watson, yaitu dengan menghitung nilai  $d$  statistik. Nilai  $d$  statistik ini dibandingkan dengan nilai  $d$  tabel dengan tingkat signifikan 5%. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi, digunakan metode Durbin-Watson (Dw Test).

- 1) Jika nilai D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- 2) Jika nilai D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Jika nilai D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

### d. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain (Azuar dkk, 2006:171). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji *spearman*. Metode ini dilakukan dengan mengkorelasikan nilai absolute residual dengan masing-masing variabel independen.

## 3. Uji Hipotesis

### a. Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011) dalam Fazula (2017). Penolakan atau penerimaan hipotesis berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi kurang atau sama dengan 0,05 menyatakan bahwa secara partial variabel independen (CSR, dan *Size*) berpengaruh terhadap variabel dependen (*Effective Tax Rate*).
- 2) Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 menyatakan bahwa secara partial variabel independen (CSR, dan *Size*) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (*Effective Tax Rate*).

**b. Uji F**

Berdasarkan Ghozali (2011) dalam Fazula (2017) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Penolakan atau penerimaan hipotesis berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05 maka semua variabel independen (CSR, dan *Size*) secara serentak berpengaruh terhadap variabel dependen (*Effective Tax Rate*).
- 2) Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka semua variabel independen (CSR, dan *Size*) secara serentak tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (*Effective Tax Rate*).

**c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Nilai R-Square adalah untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas (Azuar dkk,2013:174). Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah independen yang dimasukkan ke dalam model. Karena dalam penelitian ini menggunakan banyak variabel independen, maka nilai Adjusted  $R^2$  lebih tepat digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 43 perusahaan. Fokus penelitian ini adalah ingin melihat pengaruh variabel independen (pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan ukuran perusahaan (*size*) terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak (ETR).

Penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan (*annual report*) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan juga laporan berkelanjutan (*sustainability report*) yang telah disinggung pada bab sebelumnya. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

Tabel IV.1  
Hasil Penentuan Sampel

No	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016	43
2.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan berkelanjutan ( <i>sustainability report</i> )	(34)
3.	Perusahaan yang mengalami kerugian ditahun penelitian	(1)
4.	Total perusahaan	8
5.	Total sampel penelitian (8 x 5 tahun)	40

Sumber : data diolah (2018)

Daftar perusahaan yang memenuhi kriteria sampel adalah :

Tabel IV.2  
Daftar perusahaan yang menjadi sampel

No.	Kode Efek	Nama Emiten
1	BBNI	PT. Bank Negara Indonesia Tbk.
2	BBRI	PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.
3.	BBTN	PT. Bank Tabungan Negara Tbk.
4	BDMN	PT. Bank Danamo Indonesia Tbk.
5	BJTM	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
6	BMRI	PT. Bank Mandiri Tbk.
7	BNGA	PT. Bank Cimb Niaga
8	BNII	PT. Bank Internasional Indonesia Tbk.

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Data yang diperoleh berasal dari laporan keuangan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang akan diolah menggunakan program SPSS v.16.00.

## B. Pengujian dan Hasil Analisis Data

### 1. Hasil Statistik Deskriptif

Deskriptif data variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pengungkapan *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, dan agresivitas pajak pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan model persamaan regresi linear berganda. Berikut ini ditampilkan data statistik secara umum dari seluruh data yang digunakan pada Tabel IV.3 berikut :

Tabel IV.3

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Pengungkapan CSR	40	.12	.79	28.59	.7148	.17682	.031
Ukuran Perusahaan	40	17.19	20.76	770.72	19.2679	.98044	.961
Agresivitas Pajak (ETR)	40	.20	.36	9.94	.2486	.03766	.001
Valid N (listwise)	40						

Sumber : data diolah (2018)

Dari tabel statistik deskriptif seperti yang ditampilkan pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Besarnya pengungkapan *corporate social responsibility* pada 8 perusahaan mempunyai rata-rata sebesar 0,7148, nilai minimum sebesar 0,12, nilai *maximum* sebesar 0,79, dan standar deviasi sebesar 0,17682. Nilai rata-rata lebih besar dari

standar deviasi, berarti bahwa sebaran nilai dari variabel pengungkapan *corporate social responsibility* baik.

b. Ukuran Perusahaan

Besarnya ukuran perusahaan pada 8 perusahaan mempunyai rata-rata sebesar 19,2679, nilai minimum sebesar 17,19, nilai *maximum* sebesar 20,76, dan standar deviasi sebesar 0,98044. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, berarti bahwa sebaran nilai dari variabel ukuran perusahaan baik.

c. Agresivitas Pajak

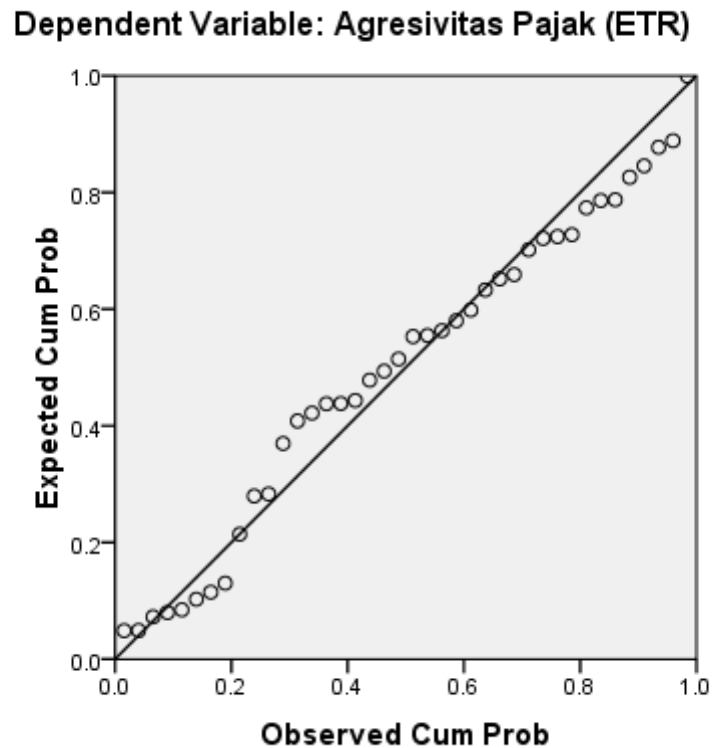
Besarnya agresivitas pajak (ETR) pada 8 perusahaan mempunyai rata-rata sebesar 0,2486, nilai minimum sebesar 0,20, nilai *maximum* sebesar 0,36, dan standar deviasi sebesar 0,03766. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, berarti bahwa sebaran nilai dari variabel agresivitas pajak baik.

## 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

### a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Cara untuk melihat adanya normalitas residual adalah dengan melihat grafik P-Plot, berikut ini uji normalitas akan disajikan dalam bentuk grafik normal plot:

### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : data diolah (2018)

Gambar IV.1

#### Uji Normalitas dengan Grafik P-Plot

Pada Gambar IV.1 dapat diketahui bahwa tampilan grafik normal P-Plot terlihat memenuhi asumsi uji normalitas, karena data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Selain itu dapat dilakukan pengujian menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov. Berikut pengujian normalitas yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.02225808
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.081
	Negative	-.106
Kolmogorov-Smirnov Z		.669
Asymp. Sig. (2-tailed)		.762

a. Test distribution is Normal.

Sumber : data diolah (2018)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui nilai *asympt sig* sebesar 0,762 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi secara normal. Karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05.

#### b. Hasil Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat perolehan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance* dari model regresi untuk masing-masing variabel bebas. Apabila nilai VIF lebih kecil dari 10,00 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji. Dan sebaliknya, Apabila nilai VIF lebih besar dari 10,00 dan nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji. Hasil analisis data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.5  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pengungkapan CSR	.993	1.007
Ukuran Perusahaan	.993	1.007

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak (ETR)

Sumber : data diolah (2018)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai VIF seluruh variabel bebas kurang dari 10,00 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas tidak terdapat multikolinearitas, sehingga data baik digunakan dalam model regresi.

### c. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi maka dilakukan pengujian Durbin – Watson (DW test). Berdasarkan hasil uji autokorelasi didapatkan nilai DW sebagai berikut :

Tabel IV.6  
Model Summary<sup>p</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.807 <sup>a</sup>	.651	.632	.02285	1.765

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Pengungkapan CSR

b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak (ETR)

Sumber : data diolah (2018)

Berdasarkan hasil uji didapatkan nilai DW sebesar 1,765. dengan nilai N sebanyak 40 observasi dan jumlah variabel bebas sebanyak 2 variabel maka didapat nilai dL sebesar 1,3908 dan dU sebesar 1,600. Nilai DW 1,765 lebih besar dari batas atas yaitu dU yakni 1,6589 dan kurang dari (4-dU)  $4-1,600= 2,400$  sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

#### d. Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain (Azuar dkk, 2006:171). Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian ini digunakan uji *Spearman*. Metode ini dilakukan dengan mengkorelasikan nilai absolute residual dengan masing-masing variabel independen.

Tabel IV.7  
Correlations

			Pengungkapan CSR	Ukuran Perusahaan	AbsRes
Spearman's rho	Pengungkapan CSR	Correlation Coefficient	1.000	.137	-.200
		Sig. (2-tailed)	.	.398	.215
		N	40	40	40
	Ukuran Perusahaan	Correlation Coefficient	.137	1.000	.147
		Sig. (2-tailed)	.398	.	.366
		N	40	40	40
	AbsRes	Correlation Coefficient	-.200	.147	1.000
		Sig. (2-tailed)	.215	.366	.
		N	40	40	40

Sumber : data diolah (2018)



Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat diketahui nilai signifikansi pada variabel bebas pengungkapan CSR lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu  $0,215 > 0,05$  dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Begitu pula dengan nilai signifikansi variabel bebas ukuran perusahaan lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu  $0,366 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada variabel ukuran perusahaan tidak terjadi heteroskedastisitas,

### 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS regresi linear berganda menunjukkan hasil analisis regresi berganda antara pengungkapan CSR dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.8

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.870	.075		11.605	.000		
Pengungkapan CSR	-.053	.021	-.251	-2.575	.014	.993	1.007
Ukuran Perusahaan	-.030	.004	-.788	-8.084	.000	.993	1.007

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak (ETR)

Sumber : data diolah (2018)

Adapun persamaan regresi yang terbentuk adalah :

$$Y = 0,867 - 0,53X_1 - 0,30X_2 + \varepsilon$$

Koefisien-koefisien persamaan regresi linier berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 0,870 menyatakan bahwa apabila semua variabel

bebas (pengungkapan CSR( $X_1$ ), ukuran perusahaan ( $X_2$ )) dianggap konstan atau bernilai 0, maka agresivitas pajak ( $Y$ ) akan sebesar 0,870.

2. Koefisien pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar -0,53 menunjukkan bahwa setiap penambahan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebesar satu satuan, maka akan diikuti oleh penurunan nilai agresivitas pajak (ETR) sebesar 0,53.
3. Koefisien ukuran perusahaan sebesar -0,30 menunjukkan bahwa setiap penambahan ukuran perusahaan sebesar satu satuan, maka akan diikuti oleh penurunan nilai agresivitas pajak (ETR) sebesar 0,30.

#### **4. Hasil Uji Hipotesis**

##### **a. Hasil Uji t**

- 1) Pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan hasil parameter pada Tabel IV.8 diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 2,575 sedangkan nilai  $t$  tabel sebesar 2,026. Nilai  $t$  hitung lebih besar daripada  $t$  tabel ( $2,575 > 2,026$ )  $H_0$  diterima  $H_0$  ditolak berarti pengungkapan CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan tingkat signifikansinya adalah 0,014 lebih kecil dari taraf signifikan yang ditentukan yaitu 0,05. Karena nilai signifikansi hitung lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan ( $0,014 < 0,05$ ) maka  $H_0$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Berarti bahwa secara parsial pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak (ETR).

2) Pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan hasil parameter pada Tabel IV.8 diperoleh nilai t hitung sebesar 8,084 sedangkan nilai t tabel sebesar 2,026. Nilai t hitung lebih besar daripada t tabel ( $8,084 > 2,026$ )  $H_0$  ditolak berarti ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan tingkat signifikansinya adalah 0 lebih kecil dari taraf signifikan yang ditentukan yaitu 0,05. Karena nilai signifikansi hitung lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan ( $0 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berarti bahwa secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak (ETR).

**b. Hasil Uji F**

Tabel IV.9  
Uji F (Uji Simultan)

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.036	2	.018	34.472	.000 <sup>a</sup>
	Residual	.019	37	.001		
	Total	.055	39			

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Pengungkapan CSR

b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak (ETR)

Sumber : data diolah (2018)

Berdasarkan hasil parameter pada tabel diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 34,472 sedangkan nilai F tabel sebesar 3,25. Nilai F hitung lebih besar daripada F tabel ( $34,472 > 3,25$ )  $H_0$  ditolak berarti pengaruh *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan tingkat signifikansinya adalah 0 lebih kecil dari taraf signifikan yaitu 0,05, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian variabel

independen (pengungkapan CSR dan ukuran perusahaan) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Agresivitas Pajak).

**c. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel IV.10

Tabel IV.10

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.807 <sup>a</sup>	.651	.632	.02285	1.765

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Pengungkapan CSR

b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak (ETR)

Sumber : data diolah (2018)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh yang ditimbulkan pengungkapan CSR dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Dari hasil output regresi diperoleh nilai R square ( $R^2$ ) sebesar 0,632. Nilai ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 0,632 atau 63,2%. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan sisanya sebesar 36,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi.

### C. Pembahasan

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan dengan objek penelitian yaitu perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel IV.11

#### Hasil Pengujian Hipotesis

No	Hipotesis	Hasil	Ditolak/diterima
1.	Pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.	Nilai $t = -2,575 > 2,026$ dengan nilai sig $0,014 < 0,05$	Diterima
2.	Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.	Nilai $t = -8,145 > 2,026$ dengan nilai sig $0 < 0,05$	Diterima
3.	Pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) dan ukuran perusahaan bersama sama memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.	Nilai $F = 34,472 > 3,25$ dengan nilai sig $0 < 0,05$	Diterima

Sumber : data diolah (2018)

**1. Pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.**

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada hipotesis pertama diperoleh nilai t sebesar 2,575. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $2,575 > 2,026$ ) maka pengungkapan CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR). Nilai signifikansi hitung sebesar 0,014. Karena nilai signifikansi hitung lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan ( $0,014 < 0,05$ ) maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Berarti variabel pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (ETR).

Dengan hasil t hitung yang negatif (-2,575) menandakan bahwa pengungkapan CSR memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak (ETR). Dimana semakin besar pengungkapan CSR maka semakin rendah nilai ETR. Nilai ETR yang rendah mengindikasikan bahwa tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan lebih besar.

Hal tersebut dikarenakan perusahaan juga dapat menggunakan dana hasil penghematan pajak untuk secara langsung berinvestasi pada aktivitas CSR. Lebih jauh, beberapa aktivitas yang memperbaiki kesejahteraan sosial juga dapat mengurangi pajak. Dalam konteks Indonesia misalnya, beberapa pengeluaran perusahaan terkait CSR dapat menjadi pengurang pajak (*deductible expenses*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010. Akibatnya, semakin besar pengeluaran CSR maka beban pajak bisa dapat semakin berkurang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2013), Ratmono (2015), Yoehana(2013) dan L.Watson (2012)

yang menyatakan bahwa pengungkapan CSR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Rina (2016) yang mengatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

## **2. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.**

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada hipotesis kedua diperoleh nilai t sebesar 8,084. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $8,084 > 2,026$ ) maka ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR). Nilai signifikansi hitung sebesar 0. Karena nilai signifikansi hitung lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan ( $0 < 0,05$ ) maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Berarti variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (ETR).

Dengan hasil t hitung yang negatif (-8,084) menandakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak (ETR). Dimana semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah nilai ETRnya. Nilai ETR yang rendah mengindikasikan bahwa tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan lebih besar.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan Mangoting (2014) dan Lanis dan Richardson (2012: 95) serta Ratmono dan Sagala (2015) yang mengatakan bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih besar disbanding dengan perusahaan yang lebih kecil. Karena perusahaan besar memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar yang memungkinkan untuk mengurangi beban pajak mereka.

Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Rina (2016) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

### **3. Pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) dan ukuran perusahaan bersama sama memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.**

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa nilai F sebesar 34,472. Karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel ( $34,472 > 3,25$ ) maka pengungkapan CSR dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR). Nilai signifikansi F hitung sebesar 0. Karena nilai signifikansi F hitung lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan ( $0 < 0,05$ ) maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa variabel pengungkapan CSR dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Dari hasil output regresi diperoleh nilai Adjusted R *square* ( $R^2$ ) sebesar 0,632. Nilai ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 0,632 atau 63,2%. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan sisanya sebesar 36,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nona Fajar Rina (2016) yang menyatakan bahwa variabel pengungkapan CSR, ukuran perusahaan (*size*), *leverage*, *ROA*, dan kepemilikan keluarga secara bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data tentang pengungkapan *corporate social responsibility* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji t, nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $2,575 > 2,026$ ). Nilai signifikansi hitung lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan ( $0,014 < 0,05$ ) berarti Pengungkapan *corporate social responsibility* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (ETR)
2. Berdasarkan hasil uji t, nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $8,084 > 2,026$ ) Nilai signifikansi hitung lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan ( $0 < 0,05$ ) berarti secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (ETR)
3. Berdasarkan hasil uji F, nilai F hitung lebih besar dari F tabel ( $34,472 > 3,25$ ) Nilai signifikansi F hitung lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan ( $0 < 0,05$ ) berarti Pengungkapan *corporate social responsibility* dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (ETR)

## B. Saran

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya untuk variabel CSR, penggunaan item pengukur yang lebih banyak dan detail, misalnya dengan mengadopsi GRI versi 4 agar hasil lebih akurat dan relevan, serta menggunakan proksi lain untuk mengukur tingkat agresivitas pajak perusahaan.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambah atau menggunakan proksi lain untuk mengukur agresivitas pajak. Bagi manajemen perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan setiap tindakan yang akan dilakukan serta risiko yang akan ditanggung terkait dengan kewajiban beban pajaknya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau mengganti variabel lain seperti *Good Corporate Governance*, kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, *capital intensity*, *inventory intensity* dan lain-lain. Penelitian selanjutnya juga bisa mengganti obyek penelitian yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erbert dan Griffin. 2015. *Pengantar Bisnis edisi Kesepuluh*. Jakarta : Erlangga
- Hidayanti, A.N. 2013. *Pengaruh antara kepemilikan keluarga dan corporate governance terhadap tindakan pajak agresif*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Ikhsan, Arfan dkk. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung : Cita Pustaka Media
- Ilyas, Wirawan dan Priantara, Diaz. 2016. *Manajemen & Perencanaan Pajak Berbasis Risiko*. Jakarta : In Media
- Jessica, dan Toly, A.A. 2014. *Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak*. *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No. 1, 2014.
- Juliandi, Azuar dkk. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep & Aplikasi* Medan: UMSU Press
- Kartini, Dwi. 2009. *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama
- Komputer, Wahana. 2017. *Ragam Model Penelitian dan Pengolahannya dengan SPSS*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Lanis, R dan Richardson, G. 2012. *Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis*. *J. Account. Public Policy* 31 (2012) 86–108.
- Muzakki, M.R. 2015. *Pengaruh corporate social responsibility dan capital intensity terhadap penghindaran pajak*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Nugraha, N.B. 2015. *Pengaruh corporate social responsibility, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan capital intensity terhadap agresivitas pajak*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Octaviana, M.E. 2014. *Pengaruh agresivitas pajak terhadap corporate social responsibility : Untuk menguji teori legitimasi*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

- Purwanggono, E.A. 2015. *Pengaruh corporate social responsibility dan kepemilikan mayoritas terhadap agresivitas pajak*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Ratmono, D, dan Sagala, W.M. 2015. *Pengungkapan corporate social responsibility (csr) sebagai sarana legitimasi: dampaknya terhadap tingkat agresivitas pajak*. Jurnal nominal/volume IV nomor 2/tahun 2015.
- Riahi, Ahmed dan Belkaoui. 2000. *Teori Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat
- Rina,Nona Fajar.2016. *Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility (CSR,) ukuran perusahaan (size), leverage, return on asset (ROA) dan kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Sarwono,Jonathan. 2014. *Teknik Jitu Memilih prosedur analisis skripsi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Sembiring, E. R. 2005. *Karakteristik perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial: Study empiris pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta*. Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo.
- Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta : Salemba Empat
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suyanto, K.D., dan Supramono. 2012. *Likuiditas, leverage, komisaris independen, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak perusahaan*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.16, No.2 Mei 2012, hlm. 167–177.
- Wahyudi,Dudi.2015.*Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap penghindaran pajak di Indonesia Edisi 2 No.4 ISSN :2355-4118*. Jakarta:Jurnal Lingkar Widyaaiswara
- Waluyo dan Ilyas, Irawan B. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Watson, Luke. 2012. *Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance, and Tax Aggressiveness. The journal of the American Taxation Association vol.37;issue.2:pages1-21*
- Wisanggeni, Irwan dan Suharli, Michell. 2017. *Manajemen Perpajakan Taat Pajak dengan Efisien*. Jakarta : Mitra Wacana Media

Yoehana, M. 2013. *Analisis pengaruh corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat

<http://www.idx.co.id>. Diakses 4 Desember 2017.

<http://www.sahamok.com>. Diakses 4 Desember 2017

# LAMPIRAN

**Daftar Perusahaan Yang Mengungkapkan Csr Dengan Menerbitkan Laporan  
Berkelanjutan**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	AGRO	X	X	X	X	X	
2	AGRS	X	X	X	ü	ü	
3	ARTO	X	X	X	X	X	
4	BABP	X	X	X	X	X	
5	BACA	X	X	X	X	X	
6	BBCA	X	X	X	ü	ü	
7	BBHI	X	X	X	X	X	
8	BBKP	X	X	X	X	X	
9	BBMD	X	X	X	X	X	
10	BBNI	ü	ü	ü	ü	ü	SAMPEL 1
11	BBNP	X	X	X	X	X	
12	BBRI	X	ü	ü	ü	ü	SAMPEL 2
13	BBTN	ü	ü	ü	ü	ü	SAMPEL 3
14	BBYB	X	X	X	X	X	
15	BCIC	X	X	X	X	X	
16	BDMN	ü	ü	ü	ü	X	SAMPEL 4
17	BEKS	X	X	X	X	X	
18	BGTB	X	X	X	X	X	
19	BINA	X	X	X	X	X	
20	BJBR	X	X	X	X	X	
21	BJTM	ü	ü	ü	ü	ü	SAMPEL 5
22	BKSW	X	X	X	X	X	
23	BMAS	X	X	X	X	X	
24	BMRI	ü	ü	ü	ü	ü	SAMPEL 6
25	BNBA	X	X	X	X	X	
26	BNGA	ü	ü	ü	ü	ü	SAMPEL 7
27	BNII	ü	ü	ü	ü	ü	SAMPEL 8
28	BNLI	ü	ü	ü	ü	ü	SAMPEL 9

29	BSIM	X	X	X	X	X	
30	BSWD	X	X	X	X	X	
31	BTPN	X	X	X	X	X	
32	BVIC	X	X	X	X	X	
33	DNAR	X	X	X	X	X	
34	INPC	X	X	X	X	X	
35	MAYA	X	X	X	X	X	
36	MCOR	X	X	X	X	X	
37	MEGA	X	X	X	X	X	
38	NAGA	X	X	X	X	X	
39	NISP	X	X	X	X	X	
40	NOBU	X	X	X	X	X	
41	PNBN	X	X	X	X	X	
42	PNBS	X	X	X	X	X	
43	SDRA	X	X	X	X	X	

Keterangan:

Jumlah sampel : 9

BNLI pada tahun 2016 mengalami kerugian, sehingga tidak masuk kriteria sampel penelitian.

**Jumlah sampel 9-1= 8 sampel x 5 tahun penelitian = 40 sampel penelitian.**



**Checklist item pengungkapan informasi CSR**

KATEGORI		CHECKLIST				
		2012	2013	2014	2015	2016
<b>LINGKUNGAN</b>						
1	Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset & pengembangan untuk pengurangan polusi					
2	Pernyataan yg menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi					
3	Pernyataan yg menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi					
4	Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber alam, misalnya, reklamasi daratan atau reboisasi					
5	Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas					
6	Penggunaan material daur ulang					
7	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat perusahaan					
8	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan					
9	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan					
10	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah					
11	Pengolahan limbah					
12	Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan					
13	Perlindungan lingkungan hidup					
<b>ENERGI</b>						
1	Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi					
2	Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi					
3	Mengungkapkan penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang					
4	Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi					
5	Pengungkapan Peningkatan efisiensi energi dari produk					
6	Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk					
7	Mengungkapkan Kebijakan energi perusahaan					
<b>KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA</b>						
1	Mengurangi polusi, iritasi, atau risik dalam lingkungan kerja					
2	Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental					
3	Mengungkapkan Statistik kecelakaan kerja					
4	Mentaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja					
5	Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja					
6	Menetapkan suatu komite keselamatan kerja					
7	Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja					
8	Mengungkapkan Pelayanan kesehatan tenaga kerja					

LAIN-LAIN TENTANG TENAGA KERJA						
1	Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat					
2	Mengungkapkan Persentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat dalam tingkat managerial					
3	Mengungkapkan Tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang cacat dalam pekerjaan					
4	Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat					
5	Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja					
6	Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan					
7	Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja					
8	Mengungkapkan Bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam proses mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan					
9	Mengungkapkan Perencanaan kepemilikan rumah karyawan					
10	Mengungkapkan Fasilitas untuk aktivitas rekreasi					
11	Mengungkapkan Presentase gaji untuk pensiun					
12	Mengungkapkan Kebijakan penggajian dalam perusahaan					
13	Mengungkapkan Jumlah tenaga kerja dalam perusahaan					
14	Mengungkapkan Tingkatan managerial yang ada					
15	Mengungkapkan Disposisi staff – dimana staff ditempatkan					
16	Mengungkapkan Jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka					
17	Mengungkapkan Statistik tenaga kerja, misal: penjualan per tenaga kerja					
18	Mengungkapkan Kualifikasi tenaga kerja yang direkrut					
19	Mengungkapkan Rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja					
20	Mengungkapkan Rencana pembagian keuntungan lain					
21	Mengungkapkan Informasi hub manajemen dengan tenaga kerja dlm meningkatkan kepuasan & motivasi kerja					
22	Mengungkapkan Informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja & masa depan perusahaan					
23	Membuat Laporan tenaga kerja yg terpisah					
24	Melaporkan Hubungan perusahaan dgn serikat buruh					
25	Melaporkan Gangguan dan aksi tenaga kerja					
26	Mengungkapkan Informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan					
27	Peningkatan Kondisi kerja secara umum					
28	Informasi Re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja					
29	Informasi Statistik perpustaran tenaga kerja					
PRODUK						
1	Pengungkapan Pengembangan produk perusahaan, termasuk pengemasannya					
2	Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk					
	Pengungkapan Informasi proyek riset perusahaan untuk					

	memperbaiki produk					
4	Pengungkapan Produk memenuhi standar keselamatan					
5	Membuat produk lebih aman untuk konsumen					
6	Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan					
7	Pengungkapan Peningkatan kebersihan/kesehatan dalam pengolahan dan penyiapan produk					
8	Pengungkapan Informasi atas keselamatan produk perusahaan					
9	Pengungkapan Informasi mutu produk yg dicerminkan dalam penerimaan penghargaan					
10	Informasi yg dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat (misalnya ISO 9000)					
<b>KETERLIBATAN MASYARAKAT</b>						
1	Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masy, pendidikan & seni					
2	Tenaga kerja paruh waktu dari mahasiswa/pelajar					
3	Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat					
4	Membantu riset medis					
5	Sebagai Sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran seni					
6	Membiayai program beasiswa					
7	Ada fasilitas perusahaan untuk masyarakat					
8	Sponsor kampanye nasional					
9	Mendukung pengembangan industri lokal					
<b>UMUM</b>						
1	Pengungkapan Tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat					
2	Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan di atas					

**Beban Pajak Perusahaan (dalam jutaan rupiah)**

NAMA PERUSAHAAN	2012	2013	2014	2015	2016	RATA-RATA
BBNI	1.851.200	2.220.224	2.694.931	2.235.616	2.892.709	2.378.936
BBRI	5.172.192	6.555.736	6.577.511	7.083.230	7.745.779	6.626.890
BBTN	499.240	578.610	433.755	690.979	711.179	582.753
BDMN	1.369.531	1.370.893	870.872	812.377	1.600.315	1.204.798
BJTM	1.001.341	1.153.510	436.752	376.750	423.912	678.453
BMRI	4.460.650	5.231.903	5.353.232	5.217.032	3.922.802	4.837.124
BNGA	1.537.066	1.535.866	856.329	142.119	768.991	968.074
BNII	484.748	613.908	250.777	401.461	676.452	485.469
RATA-RATA	2.046.996	2.407.581	2.184.270	2.119.946	2.342.767	2.220.312

**Pendapatan sebelum pajak (dalam jutaan rupiah)**

NAMA PERUSAHAAN	2012	2013	2014	2015	2016	RATA-RATA
BBNI	8.899.562	11.278.165	13.524.310	11.466.148	14.302.905	11.894.218
BBRI	23.859.572	27.910.066	30.804.112	32.494.018	33.973.770	29.808.308
BBTN	1.863.202	2.140.771	1.579.327	2.541.886	3.330.084	2.291.054
BDMN	5.486.679	5.530.213	3.553.534	3.281.534	4.393.037	4.448.999
BJTM	276.702	329.198	1.375.836	1.261.253	1.452.128	939.023
BMRI	20.504.268	24.061.837	26.008.015	26.369.430	18.572.965	23.103.303
BNGA	5.786.927	5.832.017	3.200.169	570.004	2.850.708	3.647.965
BNII	1.695.869	2.184.224	972.918	1.545.023	2.610.640	1.801.735
RATA-RATA	8.546.598	9.908.311	10.127.278	9.941.162	10.185.780	9.741.826

**Nilai Total Aset (dalam jutaan rupiah)**

NAMA PERUSAHAAN	2012	2013	2014	2015	2016	RATA-RATA
BBNI	333.303.506	386.654.815	416.573.708	508.595.288	603.031.880	449.631.839
BBRI	551.336.790	626.100.633	801.984.190	878.426.312	1.003.644.426	772.298.470
BBTN	111.748.593	131.169.730	144.582.353	171.807.592	214.168.479	154.695.349
BDMN	155.791.308	184.337.964	195.820.856	188.057.412	174.086.730	179.618.854
BJTM	29.112.193	33.046.537	37.998.046	42.803.631	43.032.950	37.198.671
BMRI	635.618.708	733.099.762	855.039.673	910.063.409	1.038.706.009	834.505.512
BNGA	197.412.481	218.866.409	233.162.423	238.849.252	241.571.728	225.972.459
BNII	115.772.908	140.546.751	143.365.211	157.619.013	166.678.902	144.796.557
RATA-RATA	266.262.061	306.727.825	353.565.808	387.027.739	435.615.138	349.839.714

## Descriptive

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Pengungkapan CSR	40	.12	.79	28.59	.7148	.17682	.031
Ukuran Perusahaan	40	17.19	20.76	770.72	19.2679	.98044	.961
Agresivitas Pajak (ETR)	40	.20	.36	9.94	.2486	.03766	.001
Valid N (listwise)	40						

## Regression

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Ukuran Perusahaan, Pengungkapan CSR <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak (ETR)

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.807 <sup>a</sup>	.651	.632	.02285	1.765

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Pengungkapan CSR

b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak (ETR)

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.036	2	.018	34.472	.000 <sup>a</sup>
	Residual	.019	37	.001		
	Total	.055	39			

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Pengungkapan CSR

b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak (ETR)

**Coefficients<sup>a</sup>**

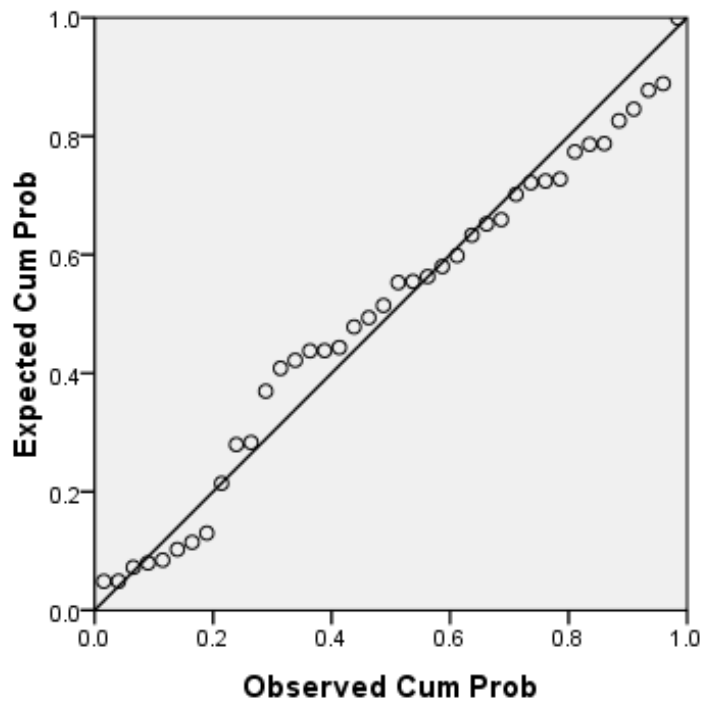
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.870	.075		11.605	.000		
	Pengungkapan CSR	-.053	.021	-.251	-2.575	.014	.993	1.007
	Ukuran Perusahaan	-.030	.004	-.788	-8.084	.000	.993	1.007

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak (ETR)

## Charts

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**

**Dependent Variable: Agresivitas Pajak (ETR)**



### Correlations

			Pengungkapan CSR	Ukuran Perusahaan	AbsRes
Spearman's rho	Pengungkapan CSR	Correlation Coefficient	1.000	.137	-.200
		Sig. (2-tailed)	.	.398	.215
		N	40	40	40
	Ukuran Perusahaan	Correlation Coefficient	.137	1.000	.147
		Sig. (2-tailed)	.398	.	.366
		N	40	40	40
	AbsRes	Correlation Coefficient	-.200	.147	1.000
		Sig. (2-tailed)	.215	.366	.
		N	40	40	40

### NPar Tests

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.02225808
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.081
	Negative	-.106
Kolmogorov-Smirnov Z		.669
Asymp. Sig. (2-tailed)		.762

a. Test distribution is Normal.